

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar guna menunjang kehidupan yang layak, sehat, dan produktif. Tingkat kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup suatu rumah tangga, di mana rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarganya (Mulia, 2022: 23).

Kesejahteraan rumah tangga tidak hanya sebagai tujuan anggota keluarga, melainkan juga sebagai tanggung jawab konstitusional negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan tujuan negara adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum”, dalam hal ini negara memberi jaminan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, akses air bersih, infrastruktur, dan keamanan bagi warga negara. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,22 juta jiwa atau sebesar 9,03 persen dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kesejahteraan bukan hanya terkait tingkat pendapatan, namun juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang cukup, sandang yang layak, rumah yang aman, pendidikan berkualitas, dan kesehatan yang terjangkau (Todaro *et al*, 2011:56). Akan tetapi masih terdapat ketidakmerataan terhadap akses pada layanan dasar tersebut di beberapa wilayah Indonesia. Misalnya saja, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (2022) mengungkap bahwa 171 wilayah kecamatan di Indonesia belum memiliki fasilitas puskesmas, padahal layanan kesehatan primer merupakan pondasi penanganan stunting, penyakit menular, dan gizi buruk. Pada sektor pendidikan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (2023) mencatat sebesar 33,21% anak Indonesia putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar. Angka ini merefleksikan keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil, biaya pendidikan yang tidak terjangkau, serta tekanan ekonomi untuk bekerja sejak dini.

Pemerintah mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara melalui GNP (*Gross National Product*) per kapita, yaitu perbandingan antara total pendapatan nasional (GNP) yang diperoleh selama satu tahun dengan jumlah penduduk negara tersebut. GNP didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik di dalam maupun luar negeri dalam periode tertentu. Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari persentase kemiskinan, yang datanya diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Sodiq, 2015: 382).

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Pembangunan ekonomi berperan dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang tercermin dalam nilai tingkat pertumbuhan dan ekonomi rata-rata per tahunnya dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di masa lalu, sektor pertanian menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, di masa sekarang peran tersebut telah beralih ke industri pengolahan hasil pertanian atau agroindustri yang lebih dominan. Aktivitas agroindustri tidak hanya memengaruhi kegiatan pertanian dasar, tetapi juga mengatur ketersediaan sarana produksi. Untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan dan pendapatan, diperlukan integrasi antara sektor pertanian dengan industri maupun jasa. Selain itu, penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa-kota dan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. (Wurarah, 2022:71).

Sektor strategis seperti pertanian terutama sub sektor perkebunan menjadi tulang punggung riil dalam menopang kesejahteraan rumah tangga, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Perkebunan sebagai bagian sektor pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan lapangan kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui komoditas seperti kopi, kelapa sawit, dan karet. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara eksplisit menyatakan bahwa perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tercermin dari kontribusi subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan (Riyono, 2022:2).

Salah satu komoditas perkebunan yang unggul di Indonesia adalah komoditas kopi. Pada periode 2022/2023, *United State Departemen of Agriculture (USDA)* melaporkan bahwa Indonesia memiliki kontribusi produksi kopi 5 % dari produksi kopi di dunia dengan total produksi kopi Indonesia senilai 489 ribu ton. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara produksi kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia (Lampiran 1).

Perkebunan kopi berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Produktivitas kopi di Provinsi Sumatera Barat mencapai 973 kg per hektare (kg/ha), menempatkannya sebagai produsen kopi dengan produktivitas tertinggi kedua di Indonesia, di bawah Sumatera Utara yang mencapai 1.265 kg/ha (Lampiran 2). Komoditas kopi yang menjadi komoditas unggulan provinsi ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun juga menjadi sumber pendapatan bagi ribuan petani dan pengusaha pengolahan kopi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut laporan dan *outlook* kopi dari *International Coffee Organization (ICO)* pada 2023, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar kedua di Asia Pasifik dengan kontribusi sebesar 5% dari total produksi kopi dunia. Selain itu Indonesia juga mengalami peningkatan konsumsi kopi sebesar 18,2% pada periode yang sama (Lampiran 3). Peningkatan ini tidak terlepas dari perubahan gaya hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring modernisasi ekonomi, yang mendorong permintaan kopi sebagai bagian dari budaya urban. Secara historis, kebutuhan kopi dalam negeri telah mengalami lonjakan signifikan. Pada awal tahun 1990-an konsumsi kopi Indonesia hanya sekitar 120.000 ton per tahun, pada 2024 angka konsumsi kopi Indonesia melonjak menjadi 180.000 ton (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia/AEKI, 2024). Fenomena ini merefleksikan pergeseran pola konsumsi kopi dari hanya sekadar kebutuhan primer menuju konsumsi kopi sebagai gaya hidup. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kedai kopi (*coffee shop culture*) dan penetrasi pasar produk kopi siap saji (Suryani *et al.*, 2021: 179).

Dalam konteks perekonomian nasional, sektor hilir agroindustri berperan dalam menghasilkan produk dan membuka lapangan kerja skala besar, sementara sektor hulu agroindustri memberikan kontribusi lebih dominan terhadap pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB). Baik rumah tangga pertanian maupun non pertanian, agroindustri hilir memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Untuk rumah tangga pertanian, industri yang memainkan peran utama adalah industri pengolahan dan pengawetan makanan (Pratiwi *et al.*, 2017 :135).

UMKM memegang peranan vital bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama sebagai upaya mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan. Sektor ini juga berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menyumbang devisa negara melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Pengolahan kopi bubuk memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan karena produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan biji kopi mentah. Melalui kegiatan pengolahan, pemilik usaha dapat mengoptimalkan pemanfaatan produk kopi yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Selain itu, usaha pengolahan kopi bubuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Usaha pengolahan kopi bubuk sangat potensial di wilayah Indonesia sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pemilik usaha dan juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan (Kadeni *et al.*, 2020: 192).

Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan industri di Sumatera Barat, memiliki 108 unit usaha pengolahan kopi bubuk yang tersebar di berbagai wilayah (Lampiran 4). Dari jumlah tersebut 70 pelaku usaha pengolahan kopi bubuk berada di Kelurahan Bukik Apik Puhun, dan tidak memiliki mesin penggilingan kopi (Lampiran 5). Bukik Apik Puhun dikenal sebagai sentra produksi kopi bubuk unggulan Kota Bukittinggi yang telah ada sejak tahun 1970-an. Keberadaan usaha pengolahan kopi di kelurahan ini tidak hanya menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga pemilik usahanya. Meski mayoritas usaha masih berskala mikro, konsistensi produksi selama puluhan tahun membuktikan ketahanan usaha ini dalam menghadapi dinamika pasar.

B. Rumusan Masalah

Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 3,31% pada tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang mempunyai perkembangan yang baik dalam meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi, serta berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor ini juga mampu menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan, mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi (Badan Pusat Statistik Tahun 2023).

Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan pada bulan Agustus 2024 diketahui bahwa Kelurahan Bukik Apik Puhun merupakan daerah terbanyak di Kota Bukittinggi yang mengolah usaha kopi bubuk. Usaha produksi kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun tergolong dalam skala mikro. Kegiatan pengolahan kopi menjadi salah satu sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagian rumah tangga di daerah tersebut. Setiap proses produksi pengolahan kopi, rumah tangga ini mampu menghasilkan 20-30 kg kopi bubuk, dengan frekuensi pengolahan mencapai 3-4 kali dalam sebulan. Kopi bubuk tersebut selanjutnya didistribusikan ke konsumen akhir melalui dua saluran distribusi yaitu melalui penjualan langsung atau melalui pedagang perantara. Meskipun sebagian pemilik usaha mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk, mayoritas masih mengandalkan pemasaran secara langsung.

Pendapatan menjadi faktor utama penentu kesejahteraan, karena berbagai aspek kesejahteraan rumah tangga sangat dipengaruhi besarnya penghasilan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok pun tidak lepas dari batasan jumlah penghasilan yang tersedia. Kapasitas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan sangat bergantung pada besaran pendapatan yang tersedia. Rumah tangga berpendapatan rendah sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan esensial akibat ketidakcukupan anggaran.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik, ada masanya terjadi penurunan pendapatan yang diperoleh akibat menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Penurunan ini terjadi karena kenaikan harga-harga di pasar sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat untuk

membeli produk kopi bubuk. Penurunan pendapatan rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk Bukik Apik berpengaruh pada pola konsumsi pangan atau non pangan pada rumah tangga pengolah usaha kopi bubuk. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pendapatan namun tidak mengubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat mengubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera (Yani *et al.*, 2020: 40).

Selain dampak pengaruh kenaikan harga barang-barang di pasar, kenaikan harga bahan baku juga memberikan dampak terhadap pendapatan rumah tangga pengolah kopi bubuk. Pada tahun 2022 harga biji kopi mentah yang dibeli oleh pengusaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik berkisar Rp25.000/kg-Rp35.000/kg dengan harga kopi bubuk asli adalah Rp70.000-Rp100.000. Sedangkan pada saat penelitian harga biji kopi mentah sebagai bahan baku sudah mengalami peningkatan yaitu berkisar Rp70.000/kg-Rp78.000/kg, sementara kenaikan harga jual kopi bubuk aslinya hanya sebesar Rp140.000. Artinya harga biji kopi mentah melonjak 123–180%, sementara harga jual kopi bubuk hanya naik 40–100%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan biaya produksi (bahan baku) tidak diimbangi kenaikan harga jual yang berdampak terhadap tingkat pendapatan. Selain itu terjadi kenaikan biaya bahan baku yang jauh lebih tinggi justru mengurangi keuntungan bersih produsen (Lampiran 6). Hal ini berisiko menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pemilik usaha pengolahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun Kota Bukittinggi.

Proses pengolahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik masih mengandalkan peralatan tradisional yaitu belanga sebagai alat untuk menyangrai, alat ini hanya bisa mampu menampung kapasitas terbatas dengan proses pengolahan cenderung lambat. Setiap proses produksi dengan belanga memerlukan waktu sekitar 30 menit, namun kapasitas maksimum dalam sekali proses sangrai menggunakan belanga hanya sebanyak 3 kg.

Kondisi ini menjadi tantangan mengingat usaha pengolahan kopi di wilayah tersebut telah beroperasi selama puluhan tahun. Keterbatasan ini membuat usaha rentan terhadap fluktuasi pasar. Misalnya, jika terjadi kenaikan permintaan mendadak, rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun tidak bisa merespons dengan cepat.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun adalah keterbatasan dalam kepemilikan alat produksi seperti mesin penggilingan kopi. Berdasarkan data lapangan sebanyak 70 rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan tersebut tidak memiliki mesin penggilingan sendiri sehingga agar lancarnya proses produksi mereka mengupayakan proses penggilingan kepada pihak lain yang menawarkan jasa penggilingan kopi di wilayah setempat. Hal ini menimbulkan beberapa dampak ekonomi seperti penambahan biaya produksi karena harus membayar jasa giling sebesar Rp3.000/ Kg dan tidak dapat memperbesar volume produksi dikarenakan bergantung pada waktu dan kapasitas pihak jasa. Maksudnya pihak jasa penggilingan umumnya melayani banyak pelanggan, sehingga pemilik usaha harus menunggu giliran untuk menggiling kopi, lalu jika banyak pemilik usaha yang membutuhkan layanan pada waktu bersamaan maka produksi bisa terhambat dan tertunda. Akibatnya rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun yang tidak memiliki mesin penggiling kopi tidak dapat meningkatkan jumlah produksi sesuai permintaan pasar, meskipun mereka memiliki bahan baku atau peluang. Hal ini akan menghambat pertumbuhan usaha dan membatasi pendapatan rumah tangga pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun.

Praktik penggunaan jasa penggilingan kopi secara *outsourcing* (mengalihdayakan) dengan biaya sebesar Rp3.000 per kilogram mencerminkan adanya keterbatasan modal, dan skala usaha yang masih tergolong mikro. Meskipun praktik ini tampak efisien dan mampu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kepemilikan mesin, pada kenyataannya hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Biaya *outsourcing* yang relatif tinggi berkontribusi terhadap berkurangnya pendapatan bersih yang diterima, menghambat akumulasi modal usaha, serta menjadikan rumah tangga pengolah lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Biaya *outsourcing* penggilingan kopi sebesar Rp 3.000/kg secara signifikan mengurangi pendapatan bersih rumah tangga pengolah. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan (Williamson, 1985), biaya transaksi tinggi ini menggerus margin keuntungan usaha mikro yang secara inheren rentan. Bukti empiris dari Hayami & Kawagoe (1993) pada sektor pertanian skala kecil mengkonfirmasi bahwa ketergantungan pada jasa eksternal sering menjadi beban biaya terberat, menyisakan pendapatan bersih tipis yang jarang melebihi 20% dari nilai jual. Kondisi ini secara langsung membatasi kapasitas rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi. Pada teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse (1953). Pendapatan bersih yang tersedot biaya *outsourcing* menyebabkan stagnasi investasi produktif, termasuk ketidakmampuan membeli mesin penggiling sendiri. Konsep modal ekonomi Bourdieu (1986) juga menjelaskan bagaimana ketiadaan aset produksi ini semakin memperdalam ketergantungan pada pihak eksternal, menjebak rumah tangga dalam pola subsisten tanpa prospek peningkatan skala usaha.

Selain itu, strategi pemasaran yang belum berkembang membatasi potensi peningkatan pendapatan usaha pengolahan kopi di Bukik Apik Puhun. Usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun masih bertahan pada level skala mikro, padahal telah beroperasi puluhan tahun. Hal demikian menjadi bukti nyata adanya hambatan dalam pengembangan usaha. Di sisi lain, kesejahteraan rumah tangga pemilik usaha tidak hanya bergantung pada pendapatan bersih, tetapi juga dipengaruhi oleh alokasi pengeluaran, perubahan harga bahan baku, dan akses terhadap sumber daya pendukung usaha kopi bubuk seperti modal dan teknologi.

Maka dari itu, tantangan seperti penurunan daya beli konsumen terhadap kopi bubuk, fluktuasi harga biji kopi, pemasaran usaha kopi bubuk yang belum berkembang, keterbatasan penggunaan alat pengolahan kopi, dan stagnannya skala usaha juga dapat mempengaruhi stabilitas usaha kopi bubuk untuk memperoleh pendapatan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam produksi dan pemasaran yang membatasi perkembangan usaha kopi bubuk di Bukik Apik Puhun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengungkap kolaborasi faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam membentuk tingkat kesejahteraan rumah tangga pemilik usaha tersebut. Faktor ekonomi, seperti pendapatan dan pengeluaran, berperan dalam memengaruhi tingkat kesejahteraan. Di sisi lain, faktor non-ekonomi seperti akses pendidikan, kondisi kesehatan, ketersediaan layanan kesehatan, kualitas tempat tinggal, dan kemudahan akses transportasi juga turut berkontribusi dalam memengaruhi tingkat kesejahteraan pemilik usaha kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun. Oleh karena itu muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran rumah tangga pemilik usaha olahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga pemilik usaha olahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun Kota Bukittinggi Sumatera Barat dilihat indikator kesejahteraan BPS dalam SUSENAS 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan rumah tangga pemilik usaha olahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga pemilik usaha olahan kopi bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun Kota Bukittinggi Sumatera Barat dilihat dari indikator kesejahteraan BPS dalam SUSENAS 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Tangga Pemilik Usaha Kopi Bubuk di Kelurahan Bukik Apik Puhun

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana tingkat kesejahteraan rumah tangga pengolah kopi bubuk di daerah setempat sehingga juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pengolah kopi dan sektor pertanian secara umum.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa, baik di bidang kesejahteraan ekonomi pertanian, ekonomi rumah tangga, maupun industri kopi.

